



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN

INSPEKTORAT

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

INSPEKTORAT DAERAH

JALAN JENDRAL AKHMAD YANI KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH

Email : inspektorat.seruyan@gmail.com Website : www.inspektorat.seruyankab.go.id



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 304 /2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian pada rencana kerja perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Kabupaten Seruyan Tahun 2026;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 21).


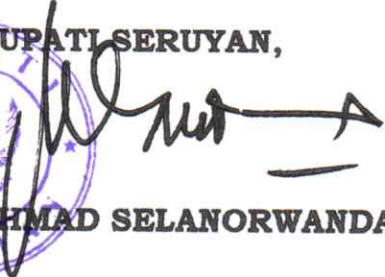
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026;
- KETIGA** : Sistematisa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** yaitu sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB V : PENUTUP.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 Juli 2025

 **BUPATI SERUYAN,**

AHMAD SELANORWANDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 304 /2025
TANGGAL 29 Juli 2025
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
8	Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
21	Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan
22	Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
26	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan
28	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
30	Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
31	Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
32	Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan
33	Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan
34	Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan
35	Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan
36	Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan
37	Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan
38	Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan
39	Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan



BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dapat disusun dengan baik sebagaimana amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja secara sistematis, terarah dan terpadu berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja ini penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan mengambil target kinerja tahun 2026 dan disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan dengan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan disertai dengan kerangka pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang pengawasan.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan serta diharapkan dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini menjadi pedoman secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara. Aamiin.

Kuala Pembuang, 29 Juli 2025

Inspektur Daerah,



NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770325 199612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	3
1.3 Landasan Hukum	12
1.4 Maksud dan Tujuan	15
1.5 Sistematika Penyusunan	16
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	19
2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024), dan perkiraan capaian tahun berjalan (2025) serta capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	19
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...	30
2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	43
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat	46
3.3 Program dan Kegiatan	53
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	55
BAB 5 PENUTUP	78



dimaksud mengacu atau berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, yaitu:

Rumusan Visi Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju dan Amanah untuk Semua

Dengan mempertimbangkan *cascade* rumusan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, maka misi yang sesuai urusan dan kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan adalah Misi ke 3, dengan rumusan sebagai berikut:

Misi 3 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa dan Inovasi Layanan Publik

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan pencapaian strategis yang mencerminkan tingkat keberhasilan tertinggi dalam pembangunan daerah. Penyusunannya didasarkan pada visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah sebagai pedoman utama dalam merumuskan strategi, kebijakan serta Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 berdasarkan Urusan Pengawasan sebagai tugas utama dari Inspektorat adalah sebagai berikut:



4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan berada pada Tipelogi Kelembagaan B sehingga Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu, terdiri dari:
 - 1) Inspektur Pembantu I;
 - 2) Inspektur Pembantu II;
 - 3) Inspektur Pembantu III;
 - 4) Inspektur Pembantu Khusus.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
 - 1) Auditor;
 - 2) P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah).
- e. Kelompok Jabatan Pelaksana.

❖ Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan diuraikan sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektur adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan



pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Sekretaris Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten, membawahi :



1) Kepala Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan Peraturan Perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dokumentasi, melaksanakan administrasi, inventaris, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. Pengkoordinasian dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. Penginventarisasian hasil pengawasan;
- f. Pengkoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan;
- g. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- h. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

2) Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Pelaksanaan perbendaharaan; dan
- g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

3. Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Pelaksanaan pengawasan kerjasama dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;



- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

4. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigative, melaksanakan koordinasi tindak pidana pencegahan korupsi dan melaksanakan pengawasan program reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigatif;
- b. Pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
- c. Pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d. Pelaksanaan peran serta dan kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur pemerintah daerah;
- e. Pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah daerah;
- f. Pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- g. Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas;
- h. Penilaian Reformasi Birokrasi;
- i. Penanganan *Whistleblowing System (WBS)*;
- j. Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);



- k. Pelaksanaan kegiatan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
- l. Pelaksanaan Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi;
- m. Pelaksanaan Verifikasi LHKPN dan LHKASN;
- n. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;
- o. Pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahan dan investigasi;
- p. Pemberian keterangan ahli dipersidangan;
- q. Perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum, Permintaan Informasi dan Pelimpahan Kasus kepada Instansi Penegak Hukum;
- r. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu dalam urusan pencegahan dan investigasi; dan
- s. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Tenaga Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Auditor dan Jabatan Fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional pengawas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok Jabatan Pelaksana adalah setiap PNS yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional. Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan yang mana nama-nama jabatan pelaksana dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

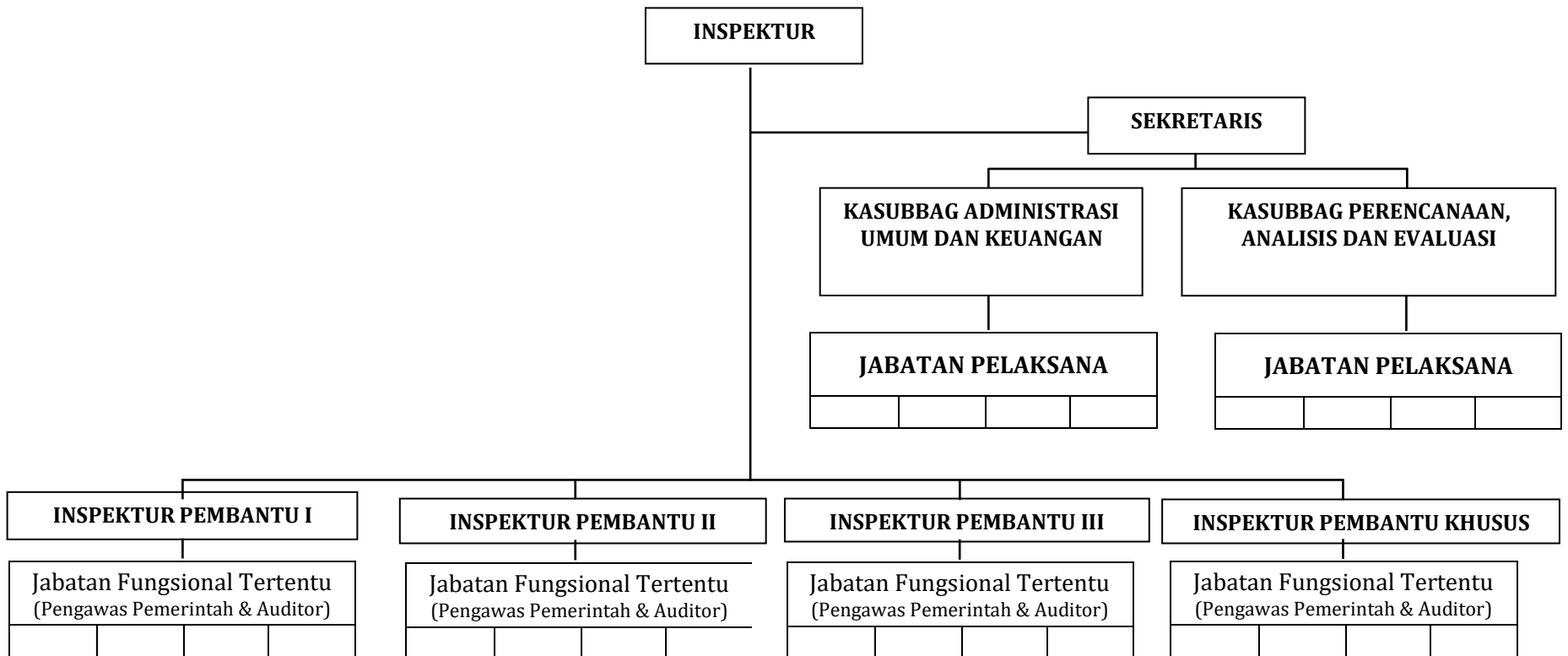


.....

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1
Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan





1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri



- Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dilakukan pemutakhiran dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 050-3708);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;



19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Seruyan Nomor 98);
22. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 22);
23. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 21).

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah memberikan arah dan pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.



Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026, yaitu :

1. Menjadi acuan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Seruyan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah Terpilih;
2. Tersedianya pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Tersedianya acuan bagi pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural, pejabat fungsional maupun pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 untuk penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026;
5. Menjadi pedoman bagi pemangku peran (*stakeholder*) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 disajikan dalam 5 (lima) Bab dan masing-masing Bab memuat beberapa Sub Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.



1.2. Gambaran Umum Inspektorat Daerah

Memuat penjelasan tentang struktur organisasi dan sumber daya Inspektorat Daerah dalam mencapai kinerja.

1.3. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja perangkat daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap hasil evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024), dan perkiraan capaian tahun berjalan (2025) serta capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional



Menjelaskan arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dan sebagai bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah harus berpedoman dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dengan tujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang telah ditetapkan.

Selain berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah harus berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), sebagai bahan acuan dalam penentuan target kinerja selanjutnya.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2026.





Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Rencana Kerja (Renja) disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana nama program, kegiatan dan sub kegiatan telah ditentukan pada peraturan tersebut.

Untuk mencapai sasaran kinerja, telah dilaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 yang mana untuk alokasi anggaran telah termuat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Tahun 2024 yaitu sebesar Rp24.754.577.872,00 dengan realisasi keuangan s.d 31 Desember 2024 sebesar Rp21.894.832.148,50, untuk persentase realisasi keuangan mencapai 88,45%.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 2.1. berikut.



Rencana Kerja Tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

TABEL 2.1

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12			14 = 7+13			15 = (14/6) x 100								
					K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp		K	SATUAN/ UNIT	Rp	
1.	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,60)	Predikat (Skor)		Predikat (Skor)		Predikat (Skor)		Predikat (Skor)		Predikat (Skor)		Predikat (Skor)		Predikat (Skor)		0	Predikat (Skor)		Predikat (Skor)		Predikat (Skor)		Predikat (Skor)		Inspektorat				
L		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	300	Persen	21.900.236.000	Persen	100	Persen	19.657.255.872	24.29	Persen	1.513.935.919	16.16	Persen	2.796.420.341	32.18	Persen	3.047.530.984.00	30.06	Persen	9.624.328.578.50	102.69	Persen	16.982.215.823	Persen	-	Persen	Inspektorat			
L1		6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	300	Persen	48.000,000	Persen	100	Persen	97.770,000	50,00	Persen	-	6,25	Persen	2.950,000	25,00	Persen	2.250,000	18,75	Persen	39.983.900,00	100,00	Persen	45.183,900	Persen		Persen	Inspektorat			
1			01 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	33	Dokumen	30.000,000	Dokumen	11	Dokumen	50.520,000	6	Dokumen	-	-	Dokumen	2.950,000	3	Dokumen	750,000	2	Dokumen	28.269.200,00	11	Dokumen	31.989,200	11	Dokumen	31.989,200	33,33	Dokumen	106,63	Inspektorat



Rencana Kerja Tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan



No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12			14 = 7+13				15 = (14/6) x 100							
					K	SATUAN/ UNIT	Rp	K		SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT		Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	
2			01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3	Laporan	9,000,000	Laporan	1	Laporan	1,500,000	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	1,500,000	0	Laporan	1	Laporan	1,500,000	1	Laporan	1,500,000	33.33	Dokumen	16.67	Inspektorat		
3			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12	Laporan	9,000,000	Laporan	4	Laporan	45,750,000	Laporan	-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1	Laporan	11,694,700.00	4	Laporan	11,694,700	4	Laporan	11,694,700	33.33	Laporan	129.94	Inspektorat	
12		2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan		300	Persen	13,526,813,000	Persen	100	Persen	5,546,197,888	25.00	Persen	483,553,887	25.00	Persen	2,188,213,171	25.00	Persen	1,158,081,159	25.00	Persen	1,367,451,572.00	100	Persen	5,207,299,799	Persen	Persen		Inspektorat			
4			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	96	Orang/Bulan	13,129,313,000	Orang/Bulan	32	Orang/Bulan	5,229,093,888	32	Orang/Bulan	483,553,887	35	Orang/Bulan	2,098,497,171	35	Orang/Bulan	1,103,805,159	35	Orang/Bulan	1,277,156,172.00	35	Orang/Bulan	4,973,012,399	35	Orang/Bulan	4,973,012,399	36.46	Orang/Bulan	37.88	Inspektorat
5			02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	36	Dokumen	375,000,000	Dokumen	12	Dokumen	236,304,000	3	Dokumen	-	3	Dokumen	87,716,000	3	Dokumen	54,276,000	3	Dokumen	57,706,000.00	12	Dokumen	199,698,000	12	Dokumen	199,698,000	33.33	Dokumen	53.25	Inspektorat
6			05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	6	Laporan	13,500,000	Laporan	2	Laporan	4,500,000	1	Laporan	-	-	Laporan	-	1	Laporan	-	0	Laporan	3,980,000.00	2	Laporan	3,980,000	2	Laporan	3,980,000	33.33	Laporan	29.48	Inspektorat
7			07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	36	Laporan	9,000,000	Laporan	12	Laporan	76,300,000	3	Laporan	-	3	Laporan	2,000,000	3	Laporan	-	3	Laporan	28,609,400.00	12	Laporan	30,609,400	12	Laporan	30,609,400	33.33	Laporan	340.10	Inspektorat



Bab II Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu



Rencana Kerja Tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					6		7			8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12			14 = 7+13			15 = (14/6) x 100								
					K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT		Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp		
13			2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	270	Persen	2.425.000,000	Persen		90	Persen	1.847.653,708	23,97	Persen	411.721,181	1,85	Persen	58.935.530	60,33	Persen	637.475,215	13,22	Persen	416.475.046,50	99,17	Persen	1.524.696,973	Persen		Persen		Inspektorat		
8			02 Pengadaan Pakain Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	195	Paket	370.000,000	Paket		65	Paket	296.766,708	0	Paket	-	0	Paket	-	65	Paket	274.459,710	0	Paket	51.183.487,50	65	Paket	325.643.198	65	Paket	325.643,198	33,33	Paket	88,01	Inspektorat
9			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengalihan administrasi kepegawaian	48	Dokumen	105.000,000	Dokumen		16	Dokumen	125.200,000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	11.674,800	1	Dokumen	8.786,200	14	Dokumen	43.847.900,00	16	Dokumen	64.308,900	16	Dokumen	64.308,900	33,33	Dokumen	61,25	Inspektorat
10			09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	75	Orang	1.350.000,000	Orang		25	Orang	975.687,000	15	Orang	125.860,685	1	Orang	47.260,730	6	Orang	345.291,705	2	Orang	149.453.672,00	24	Orang	667.866,792	24	Orang	667.866,792	32,00	Orang	49,47	Inspektorat
11			11 Bimbingan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Teknis Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45	Orang	600.000,000	Orang		15	Orang	450.000,000	14	Orang	285.860,496	0	Orang	-	1	Orang	8.937,600	0	Orang	171.989,987,00	15	Orang	466.788,083	15	Orang	466.788,083	33,33	Orang	77,80	Inspektorat
14			2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	270	Persen	2.590.423,000	Persen		90	Persen	4.251.714,000	9,87	Persen	405.346,861	25,00	Persen	210.371,666	15,79	Persen	291.444,069	49,34	Persen	2.228.822.300,00	100,00	Persen	3.135.983,887	Persen		Persen		Inspektorat		
12			01 Penyediaan Instalasi Listrik / Pengerangan Bangunan Kantor	Komponen Jumlah paket komponen instalasi listrik/pengerangan bangunan kantor yang diediakan	36	Paket	40.567,000	Paket		12	Paket	20.000,000	1	Paket	2.850,000	5	Paket	3.150,000	1	Paket	3.568,500	5	Paket	60.080.700,00	12	Paket	69.649,200	12	Paket	69.649,200	33,33	Paket	171,69	Inspektorat



Rencana Kerja Tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12			14 = 7+13			15 = (14/6) x 100												
					K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT		Rp					
13			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	185	Paket	804.000.000		Paket		60	Paket	3.005.000.000	3	Paket	211.828.000	17	Paket	18.550.000	2	Paket	63.550.000	38	Paket	1.832.775.000.00	60	Paket	2.126.703.000	60	Paket	2.126.703.000	32.43	Paket	284.52	Inspektorat	
14			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	75	Paket	75.000.000		Paket		25	Paket	40.000.000	1	Paket	3.880.000	4	Paket	-	5	Paket	9.712.000	15	Paket	40.229.000.00	25	Paket	53.821.000	25	Paket	53.821.000	33.33	Paket	71.76	Inspektorat	
15			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	36	Paket	450.000.000		Paket		12	Paket	285.000.000	2	Paket	53.220.000	4	Paket	26.110.000	2	Paket	58.055.000	4	Paket	162.425.000.00	12	Paket	299.810.000	12	Paket	299.810.000	33.33	Paket	66.62	Inspektorat	
16			05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	15	Paket	105.000.000		Paket		5	Paket	40.000.000	0	Paket	-	0	Paket	-	3	Paket	19.775.000	2	Paket	20.225.000.00	5	Paket	40.000.000	5	Paket	40.000.000	33.33	Paket	38.10	Inspektorat	
17			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	15	Dokumen	35.656.000		Dokumen		5	Dokumen	11.949.000	1	Dokumen	2.700.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	2.700.000	3	Dokumen	5.400.000.00	5	Dokumen	10.800.000	5	Dokumen	10.800.000	33.33	Dokumen	30.12	Inspektorat	
18			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	101	Laporan	1.080.000.000		Laporan		33	Laporan	849.765.000	7	Laporan	130.867.861	8	Laporan	162.561.666	10	Laporan	134.083.560	8	Laporan	107.867.600.00	33	Laporan	535.200.687	33	Laporan	535.200.687	32.67	Laporan	49.56	Inspektorat	
15			2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya BMD sesuai dengan RKBMMD Perangkat Daerah	100	Persen	600.000.000		Persen		0	Persen	-	-	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	0.00	Persen	Inspektorat
19			01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1	Unit	600.000.000		Unit		0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0.00	Unit	0.00	Inspektorat	



Rencana Kerja Tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					6			7			8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12			14 = 7+13			15 = (14/5) x 100									
					K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT		Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp		
16			2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	300	Persen	1,290,000,000		Persen		100	Persen	559,042,708	25	Persen	119,795,030	25	Persen	131,819,974	25	Persen	136,630,250	25	Persen	172,187,907,000	100	Persen	560,433,161		Persen			Persen			Inspektorat
20			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	Laporan	390,000,000		Laporan		12	Laporan	89,539,732	3	Laporan	4,727,000	3	Laporan	16,751,944	3	Laporan	21,465,220	3	Laporan	54,419,877,000	12	Laporan	97,364,041	12	Laporan	97,364,041	33.33	Laporan	24.97		Inspektorat
21			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36	Laporan	900,000,000		Laporan		12	Laporan	469,592,976	3	Laporan	115,068,030	3	Laporan	115,068,030	3	Laporan	115,165,030	3	Laporan	117,768,030,000	12	Laporan	463,069,120	12	Laporan	463,069,120	33.33	Laporan	51.45		Inspektorat
17			2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPM/BMD Perangkat Daerah	270	Persen	1,420,000,000		Persen		90	Persen	7,354,877,568	4.62	Persen	83,519,959	9.23	Persen	204,130,000	32.31	Persen	821,650,300	40.00	Persen	5,399,407,853,000	86.15	Persen	6,508,708,103		Persen			Persen		Inspektorat	
22			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	75	Unit	1,050,000,000		Unit		25	Unit	393,654,000	0	Unit	-	0	Unit	-	12	Unit	140,567,000	13	Unit	258,300,010,000	25	Unit	398,867,010	25	Unit	398,867,010	33.33	Unit	37.99		Inspektorat
23			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	102	Unit	120,000,000		Unit		34	Unit	39,999,000	1	Unit	2,500,000	6	Unit	12,800,000	8	Unit	7,434,300	10	Unit	85,165,543,000	25	Unit	107,919,843	25	Unit	107,919,843	24.51	Unit	89.93		Inspektorat
24			09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	Unit	115,000,000		Unit		1	Unit	4,913,584,823	1	Unit	77,194,950	0	Unit	190,140,000	0	Unit	635,658,500	0	Unit	3,666,344,200,000	1	Unit	4,569,337,650	1	Unit	4,569,337,650	50.00	Unit	3973.34		Inspektorat
25			11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15	Unit	135,000,000		Unit		5	Unit	2,007,439,645	1	Unit	3,825,000	0	Unit	1,190,000	1	Unit	37,990,500	3	Unit	1,389,578,100,000	5	Unit	1,432,583,600	5	Unit	1,432,583,600	33.33	Unit	1061.17		Inspektorat



Rencana Kerja Tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			10			11			12			13 = 9+10+11+12			14 = 7+13			15 = (14/6) x 100			
					K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	
2.	Meningkatnya kapabilitas APP				Level Kapabilitas APP	3	Level		Level		Level		Level		Level		Level		0	Level		Level		Level		Level		Level		Inspektorat					
II.		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan	262	Persen	7.100.000,000	Persen		85	Persen	3.254.410,000	10	Persen	135.786,400	68.63	Persen	603.204,482	78.53	Persen	456.913,380	80.21	Persen	2.682.038,071.000	80.21	Persen	3.877.943,333	Persen		Persen		Inspektorat			
II.8		2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	300	Persen	5.270.000,000	Persen		100	Persen	2.409.410,000	4.17	Persen	26.04	Persen	457.976,882	13.54	Persen	40.74	Persen	92.59	Persen	2.287.842,221.000	92.59	Persen	3.183.338,483	Persen		Persen		Inspektorat			
				Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	300	Persen		100	Persen	4.17	Persen		26.04	Persen		13.54		Persen	40.74		Persen		92.59		Persen	Persen		Persen							
26			01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	9	Laporan	225.000,000	Laporan		3	Laporan	75.000,000	0	Laporan	-	-	Laporan	-	0	Laporan	-	3	Laporan	12.460.000,000	3	Laporan	12.460,000	3	Laporan	12.460,000	33.33	Laporan	5.54	Inspektorat	
27			02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	90	Laporan	1.050.000,000	Laporan		30	Laporan	553.600,000	0	Laporan	-	3	Laporan	96.756,300	2	Laporan	24.921.500	19	Laporan	561.246.098,000	24	Laporan	682.923.898	24	Laporan	682.923.898	26.67	Laporan	65.04	Inspektorat	
28			03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	30	Laporan	600.000,000	Laporan		10	Laporan	276.700,000	2	Laporan	24.220,000	2	Laporan	19.740,000	4	Laporan	101.770,000	2	Laporan	14.280.000,000	10	Laporan	160.010,000	10	Laporan	160.010,000	33.33	Laporan	26.67	Inspektorat	
29			04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	36	Laporan	660.000,000	Laporan		12	Laporan	255.000,000	2	Laporan	48.440,000	2	Laporan	4.200,000	3	Laporan	34.580,000	5	Laporan	32.620.000,000	12	Laporan	119.840,000	12	Laporan	119.840,000	33.33	Laporan	17.37	Inspektorat	
30			05 Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	97	Laporan	1.775.000,000	Laporan		15	Laporan	454.600,000	0	Laporan	-	12	Laporan	305.260,082	2	Laporan	64.266,000	1	Laporan	1.082.060.000,000	15	Laporan	1.451.586,082	15	Laporan	1.451.586,082	15.46	Laporan	81.78	Inspektorat	
31			06 Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	3	Kesepakatan	600.000,000	Kesepakatan		1	Kesepakatan	222.000,000	0	Kesepakatan	-	1	Kesepakatan	-	Kesepakatan	71.660,000	Kesepakatan	143.795,261.000	1	Kesepakatan	215.455,261	1	Kesepakatan	215.455,261	33.33	Kesepakatan	35.91	Inspektorat			
32			07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	30	Dokumen	330.000,000	Dokumen		10	Dokumen	572.510,000	0	Dokumen	-	5	Dokumen	32.020,500	2	Dokumen	57.661.880	3	Dokumen	451.380,862.000	10	Dokumen	541.063,242	10	Dokumen	541.063,242	33.33	Dokumen	163.96	Inspektorat	



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12			14 = 7+13			15 = (14/6) x 100										
					K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp	K	SATUAN/ UNIT	Rp				
II.9			2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	270	Pers	1,830,000,000	Pers		90	Pers	846,000,000	7.69	Pers	63,126,400	12.82	Pers	145,227,600	23.08	Pers	102,054,000	25.64	Pers	384,196,850.00	69.23	Pers	694,694,850	Pers		Pers				
33			01	Perancangan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara / daerah yang ditangani	27	Laporen	555,000,000	Laporen		9	Laporen	200,000,000	1	Laporen	10,477,600	-	Laporen	-	1	Laporen	48,280,000	1	Laporen	37,532,550.00	3	Laporen	96,290,150	3	Laporen	96,290,150	11.11	Laporen	17.35	Inspektorat
34			02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	90	Laporen	1,275,000,000	Laporen		30	Laporen	645,000,000	2	Laporen	52,648,800	5	Laporen	145,227,600	8	Laporen	53,774,000	9	Laporen	346,664,300.00	24	Laporen	598,514,700	24	Laporen	598,514,700	26.67	Laporen	46.93	Inspektorat
III.		6.01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengendalian intern pemerintah pada perangkat daerah	270	Pers	1,250,000,000	Pers		90	Pers	1,078,912,000	13.10	Pers	385,674,589	22.88	Pers	49,975,400	38.76	Pers	150,312,691	30.95	Pers	588,710,313.00	105.69	Pers	1,034,672,993	Pers		105.69	Pers		Inspektorat	
III.10			2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan yang dirumuskan	270	Pers	275,000,000	Pers		90	Pers	623,912,000	20	Pers	242,878,689	40	Pers	49,975,400	40	Pers	115,735,536	20	Pers	216,851,179.00	120.00	Pers	625,440,804	Pers		120.00	Pers		Inspektorat	
35			01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	3	Rekomendasi	170,000,000	Rekomendasi		1	Rekomendasi	500,000,000	1	Rekomendasi	242,878,689	-	Rekomendasi	49,975,400	1	Rekomendasi	66,332,360	0	Rekomendasi	71,211,648.00	2	Rekomendasi	430,398,097	2	Rekomendasi	430,398,097	66.67	Rekomendasi	253.18	Inspektorat
36			02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan yang disusun	12	Rekomendasi	105,000,000	Rekomendasi		4	Rekomendasi	123,912,000	0	Rekomendasi	-	2	Rekomendasi	-	1	Rekomendasi	49,403,176	1	Rekomendasi	145,639,531.00	4	Rekomendasi	195,042,707	4	Rekomendasi	195,042,707	33.33	Rekomendasi	185.75	Inspektorat



Berdasarkan tabel 2.1 tersebut diatas, bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, dapat dijelaskan dengan pokok-pokok materi yang dapat disajikan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang *belum memenuhi target kinerja* hasil/keluaran yang direncanakan

- Pada Rencana Kerja Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan merencanakan 3 Program (2 Program Teknis Pengawasan dan 1 Program Penunjang), 10 Kegiatan (4 Kegiatan Teknis Pengawasan dan 6 Kegiatan Penunjang) dan 39 Sub Kegiatan (15 Sub Kegiatan Teknis dan 24 Sub Kegiatan Penunjang);
- Realisasi program untuk keseluruhan telah memenuhi target, namun ada beberapa sub kegiatan yang belum memenuhi target yaitu pada sub kegiatan:
 - ✓ Pengawasan Keuangan, dari target yang ditetapkan sejumlah 30 Laporan, terealisasi 24 Laporan, dikarenakan banyaknya penugasan mandatori sehingga tidak cukup waktu untuk merealisasikan 100%.
 - ✓ Penanganan Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara / Daerah, dari target yang ditetapkan sebanyak 9 Laporan, terealisasi 3 Laporan.
 - ✓ Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dari target yang ditetapkan sejumlah 30 Laporan, terealisasi 24 Laporan.
 - ✓ Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dari target yang ditetapkan sebanyak 40 Perangkat Daerah, terealisasi sejumlah 20 Perangkat Daerah yang melakukan penilaian mandiri reformasi birokrasi.

2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang *telah memenuhi target kinerja* hasil/keluaran yang direncanakan

- Dari sejumlah 39 sub kegiatan, terdapat 34 sub kegiatan yang memenuhi target dalam artian kinerja tercapai 100%.

3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang *melebihi target kinerja* hasil/keluaran yang direncanakan

- Terdapat 1 sub kegiatan yang targetnya melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sub kegiatan:
 - ✓ Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, dari target yang ditetapkan sejumlah 1 rekomendasi, terealisasi 2 rekomendasi. Dari target yang ditetapkan



adalah dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), telah terealisasi pula dokumen Peraturan Bupati terkait Pedoman Pengelolaan Risiko.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 tertuang dalam capaian Sasaran Strategis Tahun 2024 adalah sebagaimana Tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

No	Indikator Tujuan/Sasaran RPD dan Renstra PD	Target RPD / Renstra PD			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	B (62,83)			Cukup Baik
2.	Nilai SAKIP	B (67,50)	B (69,00)	BB (70,50)	B (64,51)			Cukup Baik
3.	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3			Baik
4.	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3			Baik

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Isu-Isu strategis Perangkat Daerah

Sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan, terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan untuk pembangunan 5 (lima) tahun kedepan demi tata kelola pengawasan yang baik dan profesional, yaitu:

1. Mengoptimalkan pembinaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Meningkatkan peran APIP sebagai **Quality Assurance** atau Penjamin Mutu dan sebagai **Consulting Partner** atau sebagai Partner Konsultasi serta sebagai **Early Warning System** atau sebagai peringatan dini dan sebagai pencegahan dini temuan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak Eksternal;



3. Mengoptimalkan kinerja Tim Penyelesai Kerugian Daerah (TPKD) dan Sekretariat TPKD dalam penyelesaian tindak lanjut hasil temuan; dan
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparat Pengawas yang bersih, baik dan professional.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2026 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada setiap tahunnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan. Program dan kegiatan Tahun 2026 yang diusulkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan merupakan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2026 dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Seruyan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) oleh karena itu perlu dilakukan review terhadap RKPD 2026 tersebut. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terhadap Program dan Kegiatan beserta Rencana Kebutuhan Dana yang termuat dalam dokumen Renja-PD yang disusun dari tahap Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir dan apabila ada koreksi atau terdapat perbedaan dalam hasil review pada setiap tahap penyusunannya dapat diperbaiki atau disempurnakan sebelum ditetapkannya RKPD Kabupaten Tahun 2026 melalui Peraturan Bupati Seruyan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.5. berikut.



Tabel 2.5

Review Terhadap RKPD Tahun 2026
Kabupaten Seruyan

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

No.	RPKD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Seruyan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	17.706.384.503	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Seruyan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	17.706.384.503	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	165.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	165.000.000	
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	11 Dokumen	80.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	11 Dokumen	80.000.000	
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	35.000.000	



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

No.	RPKD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	50.000.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	100 %	9.691.589.663	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	100 %	9.691.589.663	
4)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	9.402.485.675	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	9.402.485.675	
5)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	204.103.988	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	204.103.988	
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	60.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	60.000.000	
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD	12 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	12 Laporan	25.000.000	



No.	RPKD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Persentase BMD perangkat daerah yang terdata dengan baik	90%	40.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Persentase BMD perangkat daerah yang terdata dengan baik	90%	40.000.000	
8)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	40.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	40.000.000	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	2.250.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	2.250.000.000	
9)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	400.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	400.000.000	
10)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35 Dokumen	75.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35 Dokumen	75.000.000	
11)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Seruyan, Luar Kab.Seruyan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	1.275.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Seruyan, Luar Kab.Seruyan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	1.275.000.000	
12)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Seruyan, Luar Kab.Seruyan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	20 Orang	500.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Seruyan, Luar Kab.Seruyan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	20 Orang	500.000.000	



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

No.	RPKD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.586.949.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.586.949.000	
13)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	95.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	95.000.000	
14)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	250.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	250.000.000	
15)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	85.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	85.000.000	
16)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	700.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	700.000.000	
17)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	45.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	45.000.000	
17)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	11.949.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	11.949.000	
18)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Seruyan, Luar Kab.Seruyan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Seruyan, Luar Kab.Seruyan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan	400.000.000	



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

No.	RPKD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya BMD sesuai dengan RKBMD perangkat daerah	100%	2.019.625.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya BMD sesuai dengan RKBMD perangkat daerah	100%	2.019.625.000	
19)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Seruyan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	569.625.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Seruyan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	569.625.000	
20)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	400.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	400.000.000	
21)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	600.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	600.000.000	
22)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	450.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	450.000.000	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	833.220.840	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	833.220.840	
23)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	400.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	400.000.000	



No.	RPKD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	433.220.840	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	433.220.840	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBM Perangkat Daerah	100%	1.120.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBM Perangkat Daerah	100%	1.120.000.000	
25)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Seruyan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	420.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Seruyan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	420.000.000	
26)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	200.000.000	
27)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	
28)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	250.000.000	



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

No.	RPKD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab.Seruyan	1. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	83%	3.515.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab.Seruyan	1. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	83%	3.515.000.000	
			2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Tahun N-1	84%				2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Tahun N-1	84%		
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab.Seruyan	1. Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan 2. Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	98 Kegiatan 98 Entitas	2.705.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab.Seruyan	1. Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan 2. Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	98 Kegiatan 98 Entitas	2.705.000.000	
1)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan	95.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan	95.000.000	
2)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	39 Laporan	700.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	39 Laporan	700.000.000	
3)	Reviu Laporan Kinerja	Kab.Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan	350.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab.Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan	350.000.000	
4)	Reviu Laporan Keuangan	Kab.Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12 Laporan	300.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab.Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12 Laporan	300.000.000	
5)	Pengawasan Desa	Kab.Seruyan	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	21 Laporan	625.000.000	Pengawasan Desa	Kab.Seruyan	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	21 Laporan	625.000.000	
6)	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab.Seruyan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	220.000.000	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab.Seruyan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	220.000.000	



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

No.	RPKD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab.Seruyan, Provinsi Kalteng	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10 Dokumen	415.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab.Seruyan, Provinsi Kalteng	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10 Dokumen	415.000.000	
2.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Seruyan	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	34 Kegiatan	810.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Seruyan	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	34 Kegiatan	810.000.000	
8)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab.Seruyan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6 Laporan	210.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab.Seruyan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6 Laporan	210.000.000	
9)	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	28 Laporan	600.000.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Seruyan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	28 Laporan	600.000.000	
III.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab.Seruyan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK APIP)	Level 3 (3.050)	1.615.000.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab.Seruyan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK APIP)	Level 3 (3.050)	1.615.000.000	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab.Seruyan	Persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan	100%	800.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab.Seruyan	Persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan	100%	800.000.000	



No.	RPKD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab.Seruyan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	400.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab.Seruyan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	400.000.000	
2)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab.Seruyan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	400.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab.Seruyan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	400.000.000	
2.	Pendampingan dan Asistensi	Kab.Seruyan	1. Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) 3. Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah	91,00 75,00 (Waspada) 93%	815.000.000	Pendampingan dan Asistensi	Kab.Seruyan	1. Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) 3. Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah	91,00 75,00 (Waspada) 93%	815.000.000	
1)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Seruyan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 perangkat daerah	375.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Seruyan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 perangkat daerah	375.000.000	
2)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab.Seruyan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 perangkat daerah	45.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab.Seruyan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 perangkat daerah	45.000.000	



Rencana Kerja Tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

No.	RPKD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab.Seruyan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	300.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab.Seruyan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	300.000.000	
4)	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab.Seruyan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15 perangkat daerah	95.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab.Seruyan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 perangkat daerah	20.000.000	
Jumlah					22.836.384.503	Jumlah					22.836.384.503



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Inspektorat Daerah tidak ada usulan program dan kegiatan dari Masyarakat. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sepenuhnya adalah mandatory dari Pemerintah Pusat yang mana program dan kegiatan berupa kegiatan consulting dan assurance serta peningkatan kompetensi auditor berupa pengikutsertaan auditor pada pendidikan pelatihan teknis yang berfungsi sebagai penunjang kinerja dalam melaksanakan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Seruyan.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP dilakukan pada tahapan kegiatan, sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
2. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
4. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah;
5. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah selaku APIP Daerah melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sebagai pelaksanaan tugas dari Bupati. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 bahwa pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus :



1. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah prioritas daerah; Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti :
- Pengendalian Inflasi;
 - Peningkatan Investasi;
 - Pelayanan Publik;
 - Penanganan *Stunting*; dan
 - Swasembada Pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - pemeriksaan kinerja.
2. Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui pelaksanaan *Monitoring Centre Of Prevention* (MCP)
- Area Intervensi Perencanaan, dengan topik:
 - Pengawasan Dokumen RKPD dan Pokok Pikiran;
 - Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Hibah;
 - Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Sosial;
 - Area Intervensi Penganggaran, dengan topik:
 - Reviu Standar Harga Satuan;
 - Reviu Analisis Standar Biaya;
 - Reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
 - Audit Penggunaan Anggaran Honorarium dan Perjalanan Dinas.



- c. Area Pengadaan Barang dan Jasa, dengan topik:
 - Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Strategis (Probit Audit Proyek Strategis Daerah).
 - d. Area Pelayanan Publik, dengan topik:
 - Reviu Kinerja Pelayanan Publik Sektor Perizinan;
 - Reviu Kinerja Pelayanan Publik Sektor Pendidikan;
 - Reviu Kinerja Pelayanan Publik Sektor Kesehatan;
 - Reviu Kinerja Pelayanan Publik Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - e. Area Pengawasan APIP, dengan topik:
 - Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Dugaan Kerugian Keuangan Daerah.
 - f. Area Manajemen ASN, dengan topik:
 - Reviu Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi dan Mutasi ASN.
 - g. Area Pengelolaan BMD, dengan topik:
 - Pencegahan terjadinya korupsi pada penyalahgunaan BMD (Reviu Pengelolaan BMD).
 - h. Area Optimalisasi Penerimaan Daerah, dengan topik:
 - Pencegahan terjadinya korupsi pada penerimaan pajak dan retribusi daerah (Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah).
3. Pengawasan Rutin, antara lain:
- a. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan;
 - b. Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Reviu LPPD;
 - e. Pengawasan Keuangan Desa;
 - f. Pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dengan sasaran:
 - a. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3;
 - b. Meningkatnya nilai maturitas sistem pengendalian internal pemerintah;
 - c. Meningkatnya penerapan manajemen risiko;
 - d. Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Periode 2025-2029.

Rumusan Visi Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju dan Amanah untuk Semua

Dengan mempertimbangkan *cascade* rumusan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, maka misi yang sesuai urusan dan kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan adalah Misi ke 3, dengan rumusan sebagai berikut:

Misi 3 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa dan Inovasi Layanan Publik



Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan pencapaian strategis yang mencerminkan tingkat keberhasilan tertinggi dalam pembangunan daerah. Penyusunannya didasarkan pada visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah sebagai pedoman utama dalam merumuskan strategi, kebijakan serta Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 berdasarkan Urusan Pengawasan sebagai tugas utama dari Inspektorat adalah sebagai berikut:

Tujuan pada Misi ke 3 :
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran 1 :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah
Indikator 1 : Nilai SAKIP
Indikator 2 : Opini BPK

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan menetapkan Tujuan Perangkat Daerah, yaitu :

Tujuan Inspektorat Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Kinerja:
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
(Nilai / Level)



Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai Inspektorat Daerah, sebagai berikut :

Sasaran Inspektorat Daerah

1. Meningkatnya Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemda
Indikator : 1. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Nilai/Level)
2. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) (Skor)
3. Nilai *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP) (Skor)
2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Kualitas Layanan Pengawasan
Indikator : Indeks Kepuasan Layanan Stakeholder (Nilai)
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing penanggungjawab pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Berikut Tabel 3.2 mengenai Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja dalam rangka pencapaian Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026.



Tabel 2.2.

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029
Yang Menjadi Urusan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan**

VISI dan MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET						KONDISI AKHIR
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
VISI : Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju dan Amanah untuk Semua											
MISI 3 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa dan Inovasi Layanan Publik											
	T1. Meningkatkan tata Kelola birokrasi yang berkualitas dan inovatif dalam mendukung pemerataan pembangunan serta kemandirian desa	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B (62.83)	B (63.5)	B (65.5)	BB (68.39)	BB (70.56)	BB (70.92)	BB (70.99)	BB (70.99)
	S1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Nilai SAKIP	Nilai	B (64.51)	B (71.00)	B (73.00)	BB (74.00)	BB (75.00)	BB (76.00)	BB (77.00)	BB (77.00)
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Tabel 2.3.

Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Misi III : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa dan Inovasi Layanan Publik												
T1. Meningkatkan tata kelola birokrasi yang berkualitas dan inovatif dalam mendukung pemerataan pembangunan serta kemandirian desa			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,83	63,5	65,5	68,39	70,56	70,92	70,99	70,99
S1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			1. Nilai SAKIP	Angka	64,51	71	73	74	75	76	77	77
			2. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor (Level)	3.000 (Level 3)	3.16 (Level 3)	3.21 (Level 3)	3.26 (Level 3)	3.31 (Level 3)	3.36 (Level 3)	3.41 (Level 3)	3.41 (Level 3)
		1. Meningkatkan Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemda	1. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level (Skor)	Level 2 (2.892)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.025)	Level 3 (3.050)	Level 3 (3.075)	Level 3 (3.100)	Level 3 (3.125)	Level 3 (3.125)
			2. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Skor (Kategori)	71,5 (Rentan)	73,00 (Waspada)	75,00 (Waspada)	77,00 (Waspada)	78,00 (Terjaga)	79,00 (Terjaga)	80,00 (Terjaga)	80,00 (Terjaga)
			3. Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MSCP)	Skor	84,76	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00



Rencana Kerja Tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Kualitas Layanan Pengawasan	Indeks Layanan Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	80%	82%	85%	88%	90%	95%	95%
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Skor (Predikat)	62,60 (B)	63,95 (B)	65,00 (B)	67,00 (B)	69,00 (B)	70,15 (BB)	72,00 (BB)	72,00 (BB)



Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2026

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formulasi/Rumus Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP Hasil Quality Assurance BPKP	Skor (Level)	3.21 (Level 3)
		1. Meningkatkan Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemda	1. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Hasil Quality Assurance BPKP	Skor (Level)	3.025 (Level 3)
			2. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Hasil Survei KPK RI	Skor (Kategori)	75,00 (Waspada)
			3. Nilai <i>Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention</i> (MCSP)	Nilai <i>Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention</i> (MCSP) KPK RI	Skor	91,00
		2. Meningkatkan Kepuasan Stakeholder terhadap Kualitas Layanan Pengawasan	Indeks Layanan Kepuasan Masyarakat	Indeks hasil survei kepuasan stakeholder atas layanan Inspektorat Daerah	Indeks	82%
		3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi dari APiP	Nilai (Predikat)	65,00 (B)



3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 ini, merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang telah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Perencanaan program dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa Urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan, dan kewenangan antar susunan pemerintahan perlu diterjemahkan ke dalam bentuk konkrit aktivitas pembangunan berupa nomenklatur program dan kegiatan daerah. Transformasi urusan pemerintahan ke dalam nomenklatur program dan kegiatan di sisi lain memastikan bahwa daerah melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya, maka dengan demikian program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Dengan tersusunnya rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dalam periode perencanaan



pebangunan selama satu tahun, maka selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah beserta Perubahannya pada setiap tahun rencana selama periode Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang dalam pelaksanaannya diharapkan konsisten.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini memuat **3 (tiga) Program** (2 Program Teknis dan 1 Program Non-Teknis) dan **12 (dua belas) Kegiatan** (4 Kegiatan Teknis dan 8 Kegiatan Non-Teknis) serta **44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan** (15 Sub Kegiatan Teknis dan 29 Sub Kegiatan Non-Teknis) yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpi





BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap Perangkat dalam mengoperasikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun ini merupakan bagian yang utuh dari RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Keduanya merupakan penjabaran dari undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ini dengan program dan kegiatan serta pagu indikatif mengacu pada RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 -2029 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT KAB. SERUYAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT						22.836.384.503,00							23.308.946.588,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						22.836.384.503,00							23.308.946.588,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						22.836.384.503,00							23.308.946.588,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	<i>Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran</i>	-			100 %	17.706.384.503,00						-	17.918.946.588,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu</i>	-			100 %	165.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, D5. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan	-	170.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, D5. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		80.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	-			100 %	9.091.589.663,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan	-	9.712.997.588,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	9.402.485.675,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		9.402.997.588,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	204.103.988,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		205.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	60.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		70.000.000,00	INSPEKTORAT



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		35.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD perangkat Daerah yang terdata dengan baik	-			90 %	40.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan	-	50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		50.000.000,00	INSPEKTORAT



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	2.250.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan	-	2.130.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				85 Paket	400.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		275.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				35 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		80.000.000,00	INSPEKTORAT



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					40 Orang	1.275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		1.275.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					20 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	1.586.949.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan	-	1.586.949.000,00	INSPEKTORAT



Rencana Kerja Tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	95.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		95.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	250.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	85.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		85.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	700.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		700.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	45.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		45.000.000,00	INSPEKTORAT



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					5 Dokumen	11.949.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		11.949.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					34 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD sesuai dengan RKBM Daerah	-			100 %	2.019.625.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan	-	2.200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				15 Unit	569.025.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				20 Unit	400.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	600.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	450.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	833.220.840,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan	-	875.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	400.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		425.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	433.220.840,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		450.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMĐ Perangkat Daerah	-			100 %	1.120.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan	-	1.144.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				35 Unit	420.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		444.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	200.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Menganut tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		200.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Menganut tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		250.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	250.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Menganut tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan		250.000.000,00	INSPEKTORAT



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Tahun N-1	-			83 % 84 %	3.515.000.000,00						-	3.650.000.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	-			98 Kegiatan 98 Entitas	2.705.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Sekolah di Lingkup Pemkab Seruyan	-	2.840.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Laporan	95.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Sekolah di Lingkup Pemkab Seruyan		95.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				39 Laporan	700.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Sekolah di Lingkup Pemkab Seruyan		700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				12 Laporan	350.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Sekolah di Lingkup Pemkab Seruyan		375.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				12 Laporan	300.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Sekolah di Lingkup Pemkab Seruyan		300.000.000,00	INSPEKTORAT



Rencana Kerja Tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				21 Laporan	625.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Sekolah di Lingkup Pemkab Seruyan		700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kecepatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kecepatan	220.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Sekolah di Lingkup Pemkab Seruyan		220.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														





Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				10 Dokumen	415.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Sekolah di Lingkup Pemkab Seruyan		450.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	-			34 Kegiatan	810.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Objek Pemeriksaan dari Aduan Masyarakat / Laporan APH / Penugasan dari Kepala Daerah / Penugasan dengan Tujuan Tertentu	-	810.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				6 Laporan	210.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Objek Pemeriksaan dari Aduan Masyarakat / Laporan APH / Penugasan dari Kepala Daerah / Penugasan dengan Tujuan Tertentu		210.000.000,00	INSPEKTORAT



Rencana Kerja Tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				28 Laporan	800.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Objek Pemeriksaan dari Aduan Masyarakat / Laporan APH / Penugasan dari Kepala Daerah / Penugasan dengan Tujuan Tertentu		800.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK APIP)	-			3 (3.050) Level (Skor)	1.615.000.000,00						-	1.740.000.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditumuskan	-			100 %	800.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan	-	850.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Diusulkan				2 Rekomendasi	400.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan		425.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				4 Rekomendasi	400.000.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan		425.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Nilai Monitoring Centre of Prevention (MCP) Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah	-			91,00 Skor 75,00 (Waspada) Skor (Kategori) 93 %	815.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Perangkat Daerah di Lingkup Pemkab Seruyan	-	890.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														



Rencana Kerja Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1							30 perangkat daerah	375.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Perangkat Daerah di Lingkup Pemkab Seruyan		400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				15 perangkat daerah	45.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Perangkat Daerah di Lingkup Pemkab Seruyan		45.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	300.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Perangkat Daerah di Lingkup Pemkab Seruyan		350.000.000,00	INSPEKTORAT



Rencana Kerja Tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				15 perangkat daerah	95.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 05. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	Perangkat Daerah di Lingkup Pemkab Seruyan		95.000.000,00	INSPEKTORAT
J U M L A H								22.836.384.503,00							23.308.946.588,00	

SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-12 12:06:49

Kuala Pembuang, 29 Juli 2025
INSPEKTUR

NOMO KOESWOYO, S.STP
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19770325 199612 1 001



BAB V PENUTUP

Pada prinsipnya bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas, sedangkan yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistic-tematik, integrative dan spasial. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga dilakukan dengan tahapan dari persiapan penyusunan, Penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini disusun dengan berpedoman pada kaidah-kaidah pelaksanaan yang berlaku yaitu RPJP dan RPJM Nasional sert RPJP dan RPJM Provinsi, RPJPD, RPD, RKPD dan Renstra PD.

Rencana tindak lanjut dari rumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini juga adalah sebagai bahan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dan Rencana Operasional pada Rencana Tahun Anggaran 2026.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan akan dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Kuala Pembuang, 29 Juli 2025

INSPEKTUR DAERAH

NOMO KOESWOYO, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770325 199612 1 001